



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR B/800.1.11.1/607/DINSOS/2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu disusun Daftar Informasi Publik yang menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah ;
- b. bahwa informasi publik yang disusun oleh badan publik akan menjadi suatu Daftar Informasi Publik (DIP) yang digunakan badan publik ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
- 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 17 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan;
- KETIGA : Informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang tersedia setiap saat;
- KEEMPAT : Daftar informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA akan dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Maret 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



EDDY KARUSMAN, ST., MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19770207 200312 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : B/800.1.11.1/607/DINSOS/2026
 TANGGAL : 2 MARET 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026
 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat, Unit yang menguasai informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Profil Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	a. Tupoksi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah b. Struktur Organisasi c. Alamat Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah d. Daftar Urut Kepegawaian (DUK) e. Standar Operasional Prosedur f. Daftar Informasi Publik	Kasubag Umpeg	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
2	Laporan Keuangan	a. Ringkasan DPA b. Laporan Keuangan c. LHKPN d. Neraca e. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	Kasubag Keuangan dan Aset	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
3	Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan	a. Nama program dan kegiatan b. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta no. Telepon c. Target dan/atau capaian program kegiatan d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan e. Sumber dana dan jumlah program kegiatan f. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik	Tim Penyusunan Program	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
4	Kinerja Badan Publik	a. Renstra Dinas Sosial b. Renja Dinas Sosial c. Ringkasan RKA d. Rekap Program dan Kegiatan e. LAKIP	Tim Penyusunan Program	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	
5	Data Bidang Pemberdayaan Sosial	a. Program Pemberdayaan Sosial b. Program Undian Berhadiah c. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
6	Data Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) b. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bansos KHBS per Kabupaten / Kota c. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bansos dari Pusat di Kalimantan Tengah	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
7	Data Bidang Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Data Bencana Alam dan Sosial	Bidang Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
8	Data Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun

9	Data UPT Dinas Sosial Prov. Kalteng	Jumlah Penerima Manfaat yang Dilayani di Dalam Panti	UPT Dinas Sosial Prov. Kalteng	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
---	-------------------------------------	--	--------------------------------	---	--	-----------------------	---------

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat, Unit yang menguasai informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Data Bidang Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	DataRekap Estimasi Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Data Rekapitulasi Jumlah Bantuan Terpenuhi Korban Bencana Alam dan Sosial Data Rencana Pemenuhan Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Data Rekapitulasi Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Bidang Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat, Unit yang menguasai informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Daftar Informasi Publik	Berisi daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat	PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
2	Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan badan publik	Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial	PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun

		Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial					
		Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat					
		Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem					
3	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan yang berisi informasi tentang: a. Pedoman pengelolaan informasi, administrasi personil dan keuangan	Data pegawai	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
		Profil pimpinan dan pegawai					
		Anggaran Dinas Sosial Prov. Kalteng					
		SOP Pengajuan Surat Cuti					
		SOP Pengelola Surat Masuk					
		SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat					
		SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala					
		SOP Pengajuan SPP LS Gaji TPP Kondisi Kerja Tunjangan					
		SOP Pengajuan SPP UP TU GU LS Barang dan Jasa					
		SOP Evaluasi LAKIP					
		SOP Penyusunan Laporan					
		SOP Penyusunan Program Kerja					
		SOP Penanganan Bencana					
		SOP Pendaftaran dan Perpanjangan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)					

		SOP Prosedur Verifikasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB)					
		SOP Rekomendasi Ijin PUB					
		SOP Bantuan Sosial Kartu Huma Betang Sejahtera					
		SOP Pelayanan Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang					
		SOP Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar					
		SOP Prosedur Pengangkatan Anak					
		SOP Perencanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial					
		SOP Bimbingan Individu					
		SOP Bimbingan Kelompok					
		SOP Bimbingan Keterampilan					
		SOP Pendekatan Awal					
		SOP Praktek Belajar Kerja					
		SOP Registrasi, Orientasi dan Sosialisasi (ROS)					
		SOP Terminasi					
		SOP Bimbingan Sosial					
		Gelandangan dan Pengemis					
		SOP Pelayanan Klien					
		Gelandangan dan Pengemis					
		SOP Penerimaan Warga Binaan Sosial					
	b. Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir dan posisi, sejarah, pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima	DUK					
	c. Anggaran badan publik secara umum maupun khusus	DPA Tahun 2026	Tim Penyusunan Program	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
4	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Perjanjian kerjasama		Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
5	Surat-surat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Surat masuk Surat keluar	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
6	Daftar Perbendaharaan atau inventaris	Daftar aset Dinas Sosial Prov. Kalteng	Kasubbag Keuangan dan Aset	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
7	Rencana Strategis dan Rencana Kerja	Renstra Dinas Sosial Renja Dinas Sosial	Tim Penyusunan Program	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun / 5 Tahun
8	Agenda kerja pimpinan satuan kerja	Agenda kerja tahunan		Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
9	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan	Hak dan tata cara memperoleh informasi publik Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik Anggaran layanan informasi publik	PPID Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Setiap tahun. Dinas Sosial Prov. Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun

Di tetapkan di Palangka Raya,
pada tanggal 2 Maret 2026

KEPALA DINAS,

EDDY KARUSMAN, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19770207 200312 1 004